

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Dengan dilihat dari penyelenggaraan yang sudah di laksanakan oleh bidang pariwisata di Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika bahwa sudah ada empat penyelenggaraan urusan pariwisata dari pemerintah pusat yang sudah terlaksana, dan ada dua penyelenggaraan urusan pariwisata yang belum terlaksana.
2. Kedua Penyelenggaraan urusan pariwisata ini yang belum terlaksana yang pertama, Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten dan menerima peserta grup widya wisata pada tahun 2013 belum dilaksanakan dikarenakan karena Bidang Pariwisata untuk 5 tahun ini (2011,2012,2013,2014,2015) lebih memfokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana di setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Kemudian Penyelenggaraan Urusan Pariwisata yang kedua yang belum terlaksana adalah Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri skala kabupaten, hal ini akan dilakukan pada tahun 2015 karena tahun 2015 Bidang Pariwisata ini akan menajdi SKPD tersendiri, sehingga akan lebih fokus untuk mengurus segala yang berkaitan dengan pariwisata.
4. Aspek yang mempengaruhi kapasiatas penyelenggaraan urusan pariwisata:
 - a. Struktur Organisasi : dari Struktur organisasi sudah memenuhi kapasitas

dalam menyelenggarakan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara

- b. Sumber daya fisik : Sudah memenuhi Kapasitas dalam menyelenggarakan urusan Pariwisata.
 - c. Sumber daya manusia : Belum memenuhi Kapasitas untuk menyelenggarakan urusan pariwisata.
 - d. Sumber daya Finansial : Belum memenuhi kapasitas untuk menyelenggarakan urusan pariwisata karena biaya masih sangat kurang.
5. Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penyelenggaraan Urusan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara adalah karena kurangnya anggaran, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. Pegawai di Bidang Pariwisata mengakui bahwa pekerjaan mereka terhambat karena faktor-faktor tersebut.

4.2 SARAN

Dari Hasil Penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah :

1. Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan semaksimal mungkin.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai sehingga pelaksanaan tugas-tugas kantor dapat dilaksanakan secara maksimal dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Perlunya diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang otentik sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengusulkan untuk dibentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lebih terkonsentrasi, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Meningkatkan jumlah kunjungan dan menarik investor dengan lebih meningkatkan sarana dan prasarana penunjang (transportasi, air bersih, telpon, listrik, dll).
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada pada obyek dan daya tarik wisata sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri dalam upaya memperkenalkan Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu daerah tujuan wisata sekaligus dalam rangka memperbaiki citra Pariwisata.
8. Meningkatkan SDM masyarakat, pelaku pariwisata dan aparatur melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM.
9. Meningkatkan koordinasi antar Instansi (pemerintah) dengan pelaku pariwisata dan masyarakat.
10. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pariwisata melalui pemantapan kerjasama dan kemitraan antara pelaku pariwisata, masyarakat dan Pemerintah
11. Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dalam rangka memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
12. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dan pelaku pariwisata untuk menjaga dan melestarikan seni budaya daerah serta meningkatkan pesona seni budaya sebagai atraksi daya tarik wisata.